

**HALAMAN PENGESAHAN**

**NASKAH PUBLIKASI**

**PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017**

**(STUDI KASUS DI KELURAHAN SOROSUTAN)**

Disusun Oleh:

**CAKRA GANI AZIS**

**20130520353**

Telah disahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Agustus 2018  
Tempat : Ruang Sidang Dekanat IP  
Jam : 09.00 – 10.00 WIB

**Dosen Pembimbing**

  
**Dian Eka Rahmawati, S.IP., M.Si.**

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik**

  
**Dr. Tiun Puryaningsih, S.IP., M.Si.**



**Ketua Program Studi Ilmu  
Pemerintahan**

  
**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.**

**PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017**

**(STUDI KASUS DI KELURAHAN SOROSUTAN)**

Cakra Gani Azis, Dian Eka Rahmawati, S.IP., M.Si.

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

[cakragania@gmail.com](mailto:cakragania@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta tahun 2017 (Studi Kasus di Kelurahan Sorosutan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa partisipasi politik pemilih pemula yang telah menjadi 3 tahapan yaitu tahap pra pemilihan, tahap pemilihan dan tahap pasca pemilihan. Pemilih pemula sebagian besar telah terlibat dari setiap tahapan tersebut atas dasar kesadaran politik dari diri sendiri. Sosialisasi dari KPU Kota Yogyakarta dan Kampanye yang dilakukan pasangan calon menjadi sumber informasi bagi pemilih pemula. Agen sosialisasi politik terdiri dari keluarga, media massa, teman sebaya, sekolah. Agen sosialisasi politik banyak mempengaruhi pemilih pemula dalam berpartisipasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemilih pemula lebih dominan pada tahapan pemilihan. Pemilih pemula telah sadar dalam menggunakan hak pilihnya kemudian tingkat partisipasi pemilih pemula dalam tahap pra pemilihan rendah dikarenakan informasi dan rasa ingin tahu pemilih pemula dalam tahapan ini masih minim. Kemudian agen sosialisasi politik yang mempengaruhi pemilih pemula dalam partisipasi adalah keluarga dan sekolah karena sosialisasi politik yang diterima oleh pemilih pemula bersifat informal dan langsung.

***Keyword* : Partisipasi Politik, Pemilih Pemula dan Pilkada**

## PENDAHULUAN

### *Latar Belakang Masalah*

Tepat pada tanggal 15 Februari 2017 pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang kedua diselenggarakan. Pilkada diikuti oleh 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, 18 kota. Salah satunya daerah kota Yogyakarta. Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta mencapai 71% lebih baik jika dibandingkan pada tingkat partisipasi pada pilkada periode sebelumnya sebanyak 64,5%. Dari data pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) 298.989 dan 8.536 diantaranya terdiri dari golongan pemilih pemula yang tersebar di 14 Kecamatan yang terdiri dari:

**Tabel 1.1**

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilih Pemula Tingkat Kecamatan

<b>NO.</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>jumlah</b>
1	Danurejan	471
2	Gedongtengen	433
3	Gondokusuman	882
4	Gondomanan	314
5	Jetis	545
6	Kotagede	660
7	Kraton	511
8	Mantrijeron	725
9	Mergangsan	669
10	Ngampilan	365
11	Pakualaman	238
12	Tegalrejo	746
13	Umbulharjo	1.422
14	Wirobrajan	555
<b>Total</b>		<b>8.536</b>

**Sumber:** diolah oleh penulis dari data rekapitulasi DPT pemilih pemula 2017

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa kecamatan Umbulharjo memiliki jumlah daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilih pemula tertinggi yaitu sebanyak 1.422. Di Kecamatan Umbulharjo terdapat 7 Desa/Kelurahan diantaranya yaitu:

**Tabel 1.2**

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pemilih Pemula ditingkat Desa/Kelurahan  
Kecamatan Umbulharjo

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah
1	Giwangan	149
2	Mujamuju	237
3	Pandeyan	230
4	Semaki	97
5	Sorosutan	326
6	Tahunan	183
7	Warungboto	200
<b>Total</b>		<b>1.422</b>

*Sumber: diolah oleh penulis dari data rekapitulasi DPT pemilih pemula 2017*

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa Desa/Kelurahan Sorosutan memiliki jumlah daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilih pemula tertinggi jika dibandingkan dengan kelurahan lainnya yaitu sebanyak 326. Pemilih pemula sangat menarik untuk dikaji. Karena pemilih pemula merupakan suatu subjek dalam kegiatan politik. Termasuk kegiatan politik seperti pemilihan umum.

Dengan keterbatasan pengetahuan dan jangkauan politik, pemilih pemula masih memerlukan pembinaan untuk pengembangan peran mereka dalam bidang politik sehingga pemilih pemula dapat berpartisipasi dalam politik, termasuk dalam kegiatan pemilu agar pemilih pemula menggunakan hak pilihnya. Selain itu, keterbatasan pemilih pemula dalam pengetahuan dan pengalaman membuat pemilih pemula sering dimanfaatkan oleh seseorang atau kelompok yang berkepentingan tertentu (Usman, 2015, p. 5).

Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai partisipasi politik pemilih pemula. Untuk itu penulis menetapkan judul **“Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Kasus Di Kelurahan Sorosutan)”**.

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik pemilih pemuladi Kelurahan Sorosutan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta tahun 2017?
2. Agen-agen sosialisasi politik apa saja yang berperan terhadap partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sorosutan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta tahun 2017?

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Partisipasi Politik***

Partisipasi politik menurut Rush dan Althoff (Qodir, 2016, p. 38) adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Sedangkan menurut Budiardjo (Qodir, 2016, p. 38) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

### ***Bentuk-bentuk Partisipasi Politik***

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan nonkonvensional, bentuk partisipasi politik menurut Gabrie Almond dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk konvensional dan bentuk non konvensional (Almond, 2010: 186).

- 1) Bentuk konvensional:
  - a. Dengan memberikan suara (voting)
  - b. Dengan diskusi kelompok
  - c. Dengan kegiatan kampanye
  - d. Dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
  - e. Dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif
  - f. Dengan pengajuan petisi
- 2) Bentuk nonkonvensional:
  - a. Dengan berdemonstrasi
  - b. Dengan konfrontasi
  - c. Dengan pemogokan

- d. Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran
- e. Tindakan kekerasan politik manusia pengecualian/pembunuhan
- f. Dengan perang gerilya/revolusi

Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan Joam M. Nelson (dalam Yuliandri, 2007:75-76) partisipasi politik warga negara dapat dikategorikan dalam bentuk sebagai berikut:

1) *Electoral activity*

Segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan umum. Termaksud dalam kegiatan ini antara lain yakni memberikan sumbangan untuk sebuah partai, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye sebuah partai politik, mengajak seseorang untuk mendukung atau memilih dalam sebuah partai politik atas nama partai, memberikan suara dalam pemilihan umum, mengawasi pelaksanaan pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan visi dan misi yang disampaikan.

2) *Lobbying*

Tindakan seseorang atau kelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah atau tokoh politik dengan tujuan untuk memengaruhi pejabat atau tokoh politik tersebut menyangkut masalah-masalah tertentu yang memengaruhi kehidupan mereka.

3) *Organizational activity*

Keterlibatan warga negara ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik baik sebagai pemimpin, pengurus, atau anggota biasa. Organisasi ini mempunyai fungsi memengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik, misalnya organisasi yang spesifik menangani masalah hukum dan hak asasi manusia, lingkungan hidup, atau keagamaan.

4) *Contacting*

Yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga negara negara secara langsung (dengan mendatangi ke tempat bertugas, menghubungi

lewat telepon) terhadap pejabat pemerintah atau tokoh-tokoh politik baik dilakukan secara individual atau sekelompok orang yang jumlahnya sangat kecil.

5) *Violence*

Partisipasi politik yang berupa tindakan dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah.

***Pilkada Serentak***

Pilkada serentak adalah proses pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten dan Kota dalam lingkup wilayah atau kawasan tertentu dilakukan secara serentak/dalam waktu yang bersamaan. Selama kurun waktu 10 tahun kebelakang di Indonesia telah terjadi banyak perubahan dalam sistem pemilihan, hal tersebut dimaksudkan untuk melahirkan tata cara dan pelaksanaan pemilu yang lebih efisien. Sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih sendiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan hal ini berubah sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana dikatakan bahwa kepala daerah wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

***Sosialisasi Politik***

Sosialisasi politik adalah proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dimana individu berada; selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya (Rush & Althoff, 2007, p. 25).

Menurut Rush (2007, p. 35) bahwa agen sosialisasi politik terdiri dari keluarga, pendidikan, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama, kelompok-kelompok senggang, dan media massa. Proses sosialisasi melalui berbagai tahap sejak masa kanak-kanak sampai tingkat yang paling tinggi dalam usia dewasa. Hal ini berlangsung dalam proses yang berkesinambungan sepanjang hidup. Berikut ini adalah penjelasan mengenai agen-agen sosialisasi politik serta pendapat para ahli yang menjelaskannya:

a. Keluarga

Fase awal pembelajaran seorang anak dalam keluarga juga dapat terjadi saat proses belajar dalam keluarga sebelum anak sadar mengenai politik. Keluarga mempunyai peranan yang menentukan dalam proses sosialisasi nilai politik terhadap warga negara ataupun individu karena keluarga mempunyai kesempatan untuk menurunkan nilai-nilai politiknya kepada seseorang individu justru pada saat masa kanak-kanak (Bakti, 2012, p. 23). Selain itu, ada asumsi lain yang menyatakan bahwa sosialisasi politik yang diperoleh seorang anak dapat terjadi karena hal yang tidak disengaja.

b. Sekolah

Menurut Efriza (Bakti, 2012, p. 23), pendidikan telah dipandang sebagai satu variabel penting dalam kegiatan menjelaskan tingkah laku politik, dan terdapat banyak pembuktian tidak langsung yang menyatakan pendidikan itu penting sebagai agen sosialisasi politik. Hal ini dapat dipahami karena di sekolah anak-anak di didik di dalam suatu proses yang sangat teratur, sistematis, dan nilai-nilai politik bisa diturunkan secara langsung ataupun tidak langsung oleh guru-guru kepada anak didik. Sekolah memberikan pengertian kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Sekolah memberikan pandangan yang lebih konkret tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik.

c. Tempat kerja

Faktor penting yang menentukan adalah kesempatan berpartisipasi dalam keputusan di tempat kerja seseorang. Selanjutnya Sahid (2010: 203) menjelaskan bahwa pekerjaan dan organisasi-organisasi formal maupun informal yang dibentuk berdasarkan lingkungan pekerjaan itu, seperti serikat buruh dan semacam itu juga merupakan saluran komunikasi informasi dan keyakinan yang jelas.

d. Kelompok teman sebaya

Pada prosesnya, ketika anak-anak itu muncul dari pengaruh awal keluarganya masuk ke dalam dunia yang lebih besar dari sekolah dan kelompok-kelompok sebaya, maka mereka terkena pengaruh-pengaruhlain yang dapat memperkuat atau justru bertentangan dengan politisasi awalnya (Rush &

Althoff, 2007, p. 71). Kelompok teman sebaya merupakan suatu kelompok dari orang-orang yang seusia dan memiliki status yang sama dalam mengembangkan sikap dan perilaku, dengan siapa seseorang umumnya berhubungan atau bergaul. Sosialisasi politik melalui kelompok teman sebaya bersifat informal dan langsung (Bakti, 2012, p. 36).

e. Media massa

Diketahui bahwa media massa, surat kabar, radio, televisi, dan majalah memegang peranan penting dalam menularkan sikap-sikap dan nilai-nilai kepada bangsa-bangsa mereka, termasuk sikap dan nilai politik (Sahid, 2010: 202). Efriza (Bakti, 2012, p. 38) menjelaskan bahwa: “Di dalam suatu masyarakat yang sifatnya terkungkung atau dimana rezim berkuasa secara totaliter, dengan sendirinya, tidak banyak nilai-nilai politik yang bisa diturunkan. Tetapi dalam suatu masyarakat yang demokratis, nilai-nilai politik yang dikandung media massa sangat bervariasi. Media massa dalam hal ini, baik media cetak seperti surat kabar dan majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi, dan media online, semakin memegang peranan penting dalam mempengaruhi cara pandang, cara pikir, cara tindak, dan sikap politik seseorang”.

f. Kontak-kontak politik langsung

Kontak-kontak langsung dengan pemerintah, lembaga politik dan kehidupan politik sangat mempengaruhi sikap dan perilaku politik individu dan kelompok-kelompok untuk tetap setia atau tidak, bersedia mendukung atau tidak sistem politik, pemerintah, atau partai politik yang semula didukungnya (Sahid, 2010: 202).

***Pemilih Pemula***

Menurut pasal 1 ayat (22) UU No 10 tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pemilih pemula merupakan pemilih yang berusia antara 17-21 tahun atau baru pertama kali ikut dalam pemilu (Maesur zaky, 2009: 14)

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Jenis penelitian adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan berdasarkan kemampuan peneliti dalam menghubungkan fakta-fakta dan informasi yang didapat dengan memahami masalah dan problematika yang muncul. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mendeskripsikan suatu gejala berdasarkan indikator-indikator yang dijadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang diteliti. Indikator yang dijadikan dalam pembahasan ini adalah definisi operasional yang berdasarkan pada landasan teori.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah suatu proses untuk mengumpulkan informasi dengan cara Tanya jawab antara peneliti dengan narasumber (ibu Sri Surani selaku ketua divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, SDM dan hubungan masyarakat KPU Kota Yogyakarta, bapak Rusdianto selaku ketua divisi sosialisasi dan hubungan masyarakat, PPK Kecamatan Umbulharjo, bapak Suryo Handoko selaku bagian olah data PPS Kelurahan Sorosutan dan 10 pemilih pemula yang berada di Kelurahan Sorosutan yang dipilih secara acak). Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data cara menggunakan catatan atau foto dan rekaman. Serta menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, dokumen, peraturan-peraturan dan laporan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula***

Adanya partisipasi masyarakat terutama pemilih pemula dalam bidang politik merupakan salah satu indikator berjalannya politik secara demokratis. Untuk mengukur hal tersebut kita dapat melihatnya dari bentuk-bentuk partisipasi politik. Terdapat 3 (tiga) tahapan untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik yaitu pra pemilihan, pemilihan dan pasca pemilihan. Pada masing masing tahapan terdiri dari indikator-indikator yang digunakan untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi pemilihan pemula dalam pemilu.

#### **1. Partisipasi Politik Tahap Pra Pemilihan**

KPU kota Yogyakarta sebagai penyelenggara telah melakukan banyak terobosan demi meningkatkan partisipasi pemilih pemula diantaranya adalah dengan melakukan sosialisasi ke 78 sekolah menengah atas diseluruh Kota Yogyakarta. Hal ini merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh KPU kota Yogyakarta untuk mengakses langsung ke Sekolah Menengah Atas (SMA) agar pemilih pemula mendapatkan informasi tentang pemilukada serta memberikan simulasi bagi pemilih pemula agar pemilih pemula mengetahui tatacara pemilihan. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa, selain mengakses langsung pemilih pemula yang berada di Sekolah Menengah Atas, KPU kota Yogyakarta juga membuat gubuk informasi di 14 kecamatan yang bertujuan agar masyarakat umum dan pemilih pemula yang berada diluar bangku pendidikan juga mendapatkan informasi terkait Pemilukada dari segi tahapan, informasi terkini dan regulasi yang dimana dalam pelaksanaan sosialisasi melibatkan PPK, PPS dan relawan. KPU kota Yogyakarta dalam melaksanakan sosialisasi juga mendapat dukungan dari dua kampus yang berada dikota Yogyakarta yaitu Universitas Kristen Duta Wacana dan Universitas Akhmad Dahlan. Relawan sebanyak 182 mahasiswa ini bukan hasil rekrutmen KPU melainkan kerja sama antara KPU dengan kedua kampus dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan para mahasiswa tersebut.

Pemilih pemula yang mengikuti kegiatan sosialisasi mendapatkan himbauan tentang bagaimana pentingnya menggunakan hak pilih, namun masih ada pemilih pemula yang tidak mendapatkan sosialisasi dari KPU Kota Yogyakarta dikarenakan pemilih pemula tidak secara keseluruhan bersekolah di sekolah menengah atas yang berada dalam wilayah Kota Yogyakarta sehingga pemilih pemula tidak mendapatkan informasi mengenai pemilukada. sebagian pemilih pemula mendapatkan informasi dari media massa seperti televisi dan media cetak koran. PPK Kecamatan Umbulharjo telah melakukan sosialisasi untuk pemilih pemula yang berada diluar sekolah Kota Yogyakarta namun terdapat beberapa hambatan yaitu antusias pemilih pemula untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang terbilang masih rendah.

Informasi yang diterima oleh pemilih pemula mengenai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tidak terlepas dari kampanye yang dilakukan oleh

pasangan calon itu sendiri. Dimana dalam masa kampanye berlangsung pemilih pemula mendapatkan informasi terkait visi dan misi serta program yang diusung oleh setiap pasangan calon pemilih pemula mengetahuinya dari spanduk spanduk yang terpasang di jalanan, kemudian Koran serta televisi. Namun dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, pemilih pemula memilih untuk tidak melibatkan diri secara langsung karena pemilih pemula yang kebanyakan berstatus pelajar, sehingga waktu pemilih pemula lebih banyak dihabiskan pada kegiatan sekolah. selain itu para pemilih pemula menganggap bahwa kampanye yang dilakukan para calon dengan turun ke jalan melakukan konvoi adalah hal yang tergolong anarkis yang bisa memicu kerusuhan. Konvoi dengan menggunakan kendaraan yang tidak menggunakan knalpot juga mengganggu. Hal ini membuat pemilih pemula enggan untuk ikut serta dalam kampanye. Maka ketidakikutsertaan pemilih pemula dalam kampanye adalah untuk menghindari hal-hal negatif yang kemungkinan muncul pada saat kampanye.

## 2. Partisipasi Politik Tahap Pemilihan

Di dalam Pilkada tingkat partisipasi masyarakat mencapai 71%. Semakin tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan pemilihan umum. Sebaliknya bila tingkat partisipasi rendah pada umumnya mengidentifikasi bahwa masyarakat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan pemilihan umum. Rendah tingginya partisipasi politik masyarakat direfleksikan dengan tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Tingkat partisipasi politik yang mencapai 71% merupakan catatan positif yang ditunjukkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum dalam mewujudkan tingkat kesadaran politik masyarakat telah berhasil.

Memberikan suara pada saat pemilihan umum merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa mayoritas pemilih sudah menggunakan hak pilihnya dengan cara memberikan suara, antusias dalam memberikan suara sangat tinggi dikarenakan pemilih pemula yang ingin merasakan bagaimana sensasi datang ke TPS dan menyoblos untuk pertama kalinya. Selain itu, hal yang membuat pemilih pemula antusias untuk meramaikan pesta demokrasi ini karena pemilih pemula menganggap bahwa pilukada

adalah kegiatan yang langka terjadi tidak bisa ditemukan di tiap tahun. Ini merupakan kesadaran politik pemilih pemula dalam tahap pemilihan. Namun masih ada juga pemilih pemula yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan undangan secara langsung sehingga pemilih pemula tidak mengetahui bahwa dirinya telah terdaftar sebagai pemilih tetap. Kemudian ada yang beralasan jarak TPS yang jauh dari rumah sehingga enggan untuk pergi ke TPS. Pemilih pemula menggunakan hak pilihnya atas kesadaran untuk berpartisipasi pada pemilihan memang berdasarkan diri sendiri tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak luar. Pemilih pemula sadar bahwa dengan mereka ikut menggunakan hak pilihnya merupakan bentuk untuk mendapatkan pemimpin yang baik yang dapat memajukan daerahnya. ini menunjukkan bahwa pemilih pemula telah memiliki paham politik yang baik.

### 3. Partisipasi Politik Tahap Pasca Pemilihan

Partisipasi politik pemilih pemula pasca pemilihan dapat dilihat dari keterlibatan mereka untuk mengetahui kegiatan perhitungan suara dan memantau informasi atau perkembangan hasil suara pemilukada. bahwa pemilih pemula merasa tidak memiliki wewang dalam urusan perhitungan suara, mereka lebih mempercayakan masalah tersebut kepada petugas yaitu KPU. Dalam tahap ini tidak mengikuti kegiatan penghitungan suara secara langsung dikarenakan pemilih pemula menganggap dengan hadirnya mereka di TPS tidak akan merubah dari hasil perhitungan suara yang dilakukan KPU. Selain itu mereka juga memanfaatkan media, karena mereka hanya sekedar ingin mengetahui menang atau kalah. rendahnya keikutsertaan pemilih pemula dalam proses perhitungan suara secara langsung dikarenakan pemilih pemula sudah mempercayakan KPU kota Yogyakarta sebagai petugas perhitungan suara selain itu pemilih pemula merasa tidak punya wewenang dalam proses perhitungan. Pemilih pemula yang ikut dalam perhitungan suara hanya melalui hasil hitung cepat yang dipublikasi melalui mediamassa seperti televisi, pemilih pemula ingin mengetahui apakah pasangan calon yang telah mereka pilih terpilih sebagai Walikota dan Wakil Wali kota Yogyakarta.

### ***Agen Sosialisasi Politik***

Keterlibatan pemilih pemula dalam bidang politik menunjukkan bahwa adanya agen-agen politik yang berperan dalam sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan dan reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Agen-agen sosialisasi politik itu sendiri diantaranya adalah keluarga, media massa, teman sebaya dan sekolah.

#### **1. Keluarga**

Fase awal pembelajaran pemilih pemula dalam keluarga juga dapat terjadi saat proses belajar didalam keluarga sebelum pemilih pemula sadar tentang politik. pemilih pemula mendapatkan berbagai informasi terkait pemilihan melalui orang tua atau keluarga. Karena, pemilih pemula lebih banyak melakukan interaksi sehari-hari dengan keluarga. Selain itu orang tua juga sudah memberikan pendidikan politik berupa, pengetahuan aktor politik seperti apa yang baik menurut orang tua itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa keluarga selaku agen politik sudah berperan baik dalam tahap pengenalan serta pendidikan tentang politik untuk para anaknya. Karena pemilih pemula yang memang lebih banyak menghabiskan waktunya di dirumah sehingga interaksi sosial yang mereka lakukan lebih dominan pada keluarga.

#### **2. Media Massa**

Media massa seperti surat kabar, radio, televisi dan media online seperti internet memiliki peranan penting dalam memberikan informasi yang dapat di percaya, selain memberikan informasi media massa juga dapat mempengaruhi cara pandang, cara pikir, tindakan, dan sikap politik seseorang. Pada masa kampanye yang dilakukan pasangan calon yang menggunakan media massa televisi sangatlah efektif. Pemilih pemula mendapatkan pengetahuan baru tentang calon itu sendiri pada tahap pra pemilihan yang mendorong pemilih pemula untuk melibatkan diri dalam tahap pemilihan. Media massa selain memberikan informasi pada saat pra pemilihan, media massa juga menjadi sumber informasi pada saat pasca pemilihan dimana pemilih pemula mengguankan media massa untuk mengetahui hasil hitung cepat, dengan informasi yang diberikan oleh media

massa pemilih pemula dapat mengetahui pasangan calon yang telah mereka pilih apakah menang atau kalah. Media massa hanya menjadi tunggangan untuk partai politik dalam melakukan kampanye yang memperlihatkan para pasangan calon. Tidak ada pendidikan politik yang merubah sikap politik, pola pikir pemilih pemula. Namun pemilih pemula telah memilih media massa sebagai sumber informasi yang terpercaya terkait hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dipublikasikan oleh televisi.

### 3. Kelompok Teman Sebaya

Kelompok teman sebaya merupakan suatu kelompok dari orang-orang yang seusia dan memiliki status yang sama dalam mengembangkan sikap dan perilaku, dengan siapa seseorang umumnya berhubungan atau bergaul. Sosialisasi politik melalui kelompok teman sebaya bersifat informal dan langsung. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan pemilih pemula yang rata-rata lahir pada tahun 1999. Dapat disimpulkan bahwa, pada saat pemilihan walikota dan walikota Yogyakarta pada tahun 2017 usia pemilih pemula sekitar 17-18 tahun yang masih menyangandang status pelajar di sekolah menengah atas. Dan didalam ruang lingkup sekolah pemilih pemula juga dapat berinteraksi secara langsung. Peranan teman sebaya sebagai agen politik hanya sebatas ajakan untuk menggunakan hak pilih tidak lebih dari itu dikarenakan teman sebayanya merupakan pemilih pemula yang termasuk sama-sama masih minim pengetahuan tentang politik.

### 4. Sekolah

Seperti yang sudah dijelaskan diatas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis rata rata lahir pada tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa pada saat pemilihan walikota dan walikota Yogyakarta pada tahun 2017 usia pemilih pemula sekitar 17-18 tahun yang masih berstatus pelajar di sekolah menengah atas. Dimana di dalam ruang lingkup sekolah pemilih pemula dapat berinteraksi secara langsung. Maka dari itu, sekolah termasuk agen sosialisasi politik bagi pemilih pemula. Sekolah sangatlah berperan dalam sosialisasi politik, sekolah mewadahi KPU kota Yogyakarta sebagai penyelenggara sosialisasi untuk memberikan pendidikan politik bagi para pemilih pemula yang berada disekolah

menengah atas. Pemilih pemula yang bersekolah di sekolah menengah atas se kota Yogyakarta telah mendapatkan sosialisasi yang diselenggarakan KPU kota Yogyakarta bekerja sama dengan dinas pendidikan di 78 sekolah. Didalam sosialisasi itu sendiri, pemilih pemula mendapatkan himbauan untuk menggunakan hak pilihnya selain itu pemilih pemula juga mendapatkan simulasi dan pendidikan pemilih yang salah satu materinya terkait bagaimana dan apa yang dilakukan di TPS.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Jika dilihat secara keseluruhan bentuk-bentuk partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2017 lalu lebih banyak berpartisipasi pada tahapan pemilihan. Pada tahapan pemilihan pemilih pemula mayoritas menggunakan hak pilihnya atas kesadaran diri sendiri tanpa ada tekanan. Selain itu, pada tahapan pasca pemilihan mayoritas pemilih pemula tidak mengikuti langsung perhitungan suara. Namun, pemilih pemula menggunakan media massa untuk mengetahui apakah pasangan calon yang mereka pilih menang atau kalah. Tidak ikutsertaan mereka dalam perhitungan suara secara langsung adalah bentuk kepercayaan pemilih pemula terhadap penyelenggara yaitu KPU, selain itu juga pemilih pemula beranggapan bahwa dengan hadirnya mereka di perhitungan suara secara langsung tidak akan merubah hasil akhir dari perhitungan suara itu sendiri. Kemudian tahap pra pemilihan dapat dilihat bahwa, tingkat partisipasi pemilih pemula untuk mengetahui dan ikut serta dalam tahapan ini tergolong paling rendah. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi yang diterima oleh pemilih pemula. Selain itu, ketidak ikutsertaan pemilih pemula dalam tahap pra pemilihan dikarenakan pada tahapan ini adalah tahapan yang paling ekstrim yang dilakukan oleh beberapa pihak seperti tim sukses partai yang melakukan kampanye. Pemilih pemula menghindari kontak langsung dengan hal tersebut karena dalam pola pikir pemilih pemula menganggap bahwa kegiatan tersebut hanya dapat menimbulkan dampak negatif.

### ***Saran***

1. Bagi KPU Kota Yogyakarta

Hendaknya melakukan kegiatan sosialisasi khusus untuk pemilih pemula tidak hanya di dalam lembaga pendidikan yang berada di kota Yogyakarta saja. Karena, pemilih pemula yang terdaftar sebagai DPT tidak secara keseleruhan bersekolah di dalam wilayah Kota Yogyakarta. Kemudian peneliti juga menyarankan agar KPU kota Yogyakarta membuat form penilaian untuk mengukur tingkat partisipasi pemilih pemula dalam penggunaan hak pilihnya saat pemilihan berlangsung.

## 2. Bagi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Hendaknya lebih memberikan perhatian kepada pemilih pemula yang tidak hanya didasarkan atas pertimbangan mendapatkan suara politik saja, tetapi lebih didasarkan atas motivasi untuk memberikan pendidikan politik kepada kelompok pemilih pemula. Kemudian hapuskan budaya kampanye turun kejalan dengan mobilisasi masa yang banyak dengan cara konvoi, karena sesungguhnya pemilih pemula menghindari kegiatan tersebut karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan negatif bagi mereka sehingga pemilih pemula lebih memilih untuk tidak menyertakan diri dalam kampanye yang dilakukan oleh pasangan tersebut Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas peranan pemilih pemula.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2015). *Pilkada dan dinamika politik lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian, suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bakti, F. (2012). *Literasi politik dan konsolidasi demokrasi*. Jakarta: Churia Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lexy, M. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marijan, K. (2010). *Sistem politik Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Narbuko, C., & Ahmadi, A. (2015). *Metodologi penelitian: memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Priatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan kepala daerah langsung: filosofi, system dan problem penerapan di indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qodir, Z. (2016). *Teori dan paktik politik di Indonsia (Memahami partai, pemilu dan kejahatan politik pasca orde baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rush, M., & Althoff, P. (2007). *“Pengantar sosiologi politik,” Penerjemah Dr. Kartini Kartono*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rush, M., & Althoff, P. (2007). *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saputra, R. (2017). Partisipasi politik pemilih pemula pada pemilih presiden di kecamatan mandau kabupaten bengkalis tahun 2014. *JOM FISIP Vol - 1*, 1-12.
- Setyawan, D., & Adiwijaja, I. (2013). Pengaruh komunikasi politik aparatur pemerintah terhadap pelayanan publik. *Jurnal Reformasi*, 3.
- Sorensen, G. (2003). *Demokrasi dan demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subakti, R. (2006). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. . Bandung: Alfabeta CV .

Tanjung, B. N., & Ardial. (2005). *Pedoman penulisan karya ilmiah : (Proposal, skripsi, dan tesis) dan mempersiapkan diri menjadi penulis artikel ilmiah*. Jakarta: Kencana.

Tukiran, S. E. (2014). *Metode penelitian survei*. Jakarta: LP3ES.

Usman, A. (2015). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Lampung tahun 2014 (Studi deskriptif mahasiswa Lampung).

Undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Data Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun Tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Yogyakarta Tahun 2017

Data Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilih Pemula Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2017

Data Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pilwali Kota Yogyakarta Tahun 2017 Tingkat Kecamatan

Data Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian perhitungan Perolehan suara Dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan